

# PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DAERAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Yulia Citra

yuliacitra2707@gmail.com

Kurnia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

## ABSTRACT

*This research aimed to examine the effect of Local-owned Source Revenue, Special Allocation Funds, and General Allocation Funds on capital expenditure of the cities/districts in East Java province during 2019-2022, with economic growth as the moderating variable. The research was quantitative. The population was the cities/districts in East Java province during 2019-2022. Moreover, the data were secondary in the form of the APBD Budget Realization Report obtained from the East Java Representative Financial Audit Agency (BPK); and economic growth taken from the East Java Central Statistics Agency (BPS) via [jatim.bps.go.id](http://jatim.bps.go.id). Furthermore, the data collection technique used purposive sampling. In line with that, 37 cities/districts consisting of 9 cities and 28 districts fulfilled the criteria as a sample. In total, there were 148 data samples. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression and Moderated Regression Analysis with the SPSS 27. The result indicated that Local-owned Source Revenue affected capital expenditure. However, both the Special and General Allocation Fund did not affect capital expenditure. In addition, economic growth was able to moderate Local-owned Source Revenue on capital expenditure. On the other hand, economic growth was not able to moderate the Special as well as General Allocation Fund on capital expenditure.*

*Keywords: local-owned source revenue, special allocation fund, general allocation fund, capital expenditure, economic grow*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Relisasi Anggaran APBD tahun 2019-2022 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur serta Pertumbuhan Ekonomi dari Badan Pusat Statistik melalui website [jatim.bps.go.id](http://jatim.bps.go.id). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebanyak 37 Kabupaten/Kota yang dengan jumlah data sebanyak 148 sampel. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda dan regresi interaksi (*Moderated Reggesion Analysis*) dengan program SPSS versi 27. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, sementara itu Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pertumbuhan Ekonomi mampu Memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, namun Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu Memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, begitu juga Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu Memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Jawa Timur.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, belanja modal daerah, pertumbuhan ekonomi

## PENDAHULUAN

Perubahan penetapan sistem yang terjadi di Indonesia adalah perubahan pandangan terhadap penyelenggaraan negara yang sebelumnya terpusat menjadi pemerintahan yang

terdesentralisasi yang bercirikan pemberian otonomi kepada daerah secara luas, spesifik dan bertanggung jawab serta fokus memimpin pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan desentralisasi, daerah memiliki kebebasan penuh dalam mengelola pemerintahannya sendiri. Diharapkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan kemampuan wilayahnya untuk membiayai kebutuhan daerah, termasuk melalui pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dalam Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat berusaha untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, daerah dapat meningkatkan investasi dengan menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan dalam pengalokasian anggaran. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah, Belanja Modal memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan sarana dan prasarana publik di suatu daerah.

Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan anggarannya secara efisien dan efektif, terutama untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Permasalahan yang terjadi yaitu ketidakstabilan alokasi belanja modal pada daerah Jawa Timur dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 Belanja Modal pada Jawa Timur mengalami penurunan yang cukup tinggi dikarenakan adanya pandemi sehingga perekonomian dan pembangunan di Jawa Timur melambat.

**Tabel 1**  
**Rata-Rata Belanja Modal di Jawa Timur**

<b>Tahun</b>	<b>Rata-Rata Belanja Modal</b>
2019	2.770.973.973.023,11
2020	1.904.556.949.359,00
2021	1.969.920.805.338,69
2022	2.505.994.499.065,62

Sumber: BPK Jawa Timur (2023)

Belanja modal memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah tersebut. Pada tabel 1 yang memaparkan rata-rata belanja modal di Jawa Timur selama periode 2019-2022, terlihat bahwa belanja modal cenderung tidak stabil, bahkan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019 belanja modal di Jawa Timur sebesar Rp 2.770.973.973.023,11 Pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan yang cukup besar yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp 1.904.556.949.359,00 adanya penurunan Belanja Modal pada tahun 2020 terutama disebabkan oleh adanya pandemi yang mendorong alokasi dana untuk lebih difokuskan pada belanja rutin guna memberikan bantuan kepada masyarakat. Dampak dari pandemi secara signifikan memengaruhi anggaran Belanja Modal, yang sebelumnya hanya mengalami penurunan yang terbatas pada tahun 2020. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang sangat sedikit pada belanja modal di Jawa Timur sebesar Rp 1.969.920.805.338,69 dari Rp 1.904.556.949.359,00 Ditahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup besar pada belanja modal di Jawa Timur sebesar Rp 2.505.994.499.065,62 dikarenakan terjadi pemulihan ekonomi setelah masa-masa sulit yang disebabkan oleh pandemi. Dalam Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami penurunan dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya dan sesudahnya pasca pandemi, hal ini disebabkan upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur guna memulihkan ekonomi

pasca pandemi, peningkatan investasi dalam proyek-proyek pembangunan, serta perencanaan strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan belanja modal ini dapat mencerminkan komitmen pemerintah dalam menggalakkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Semakin besar pendapatan asli daerah, semakin besar peluang bagi pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Alvaro dan Prasetyo (2020) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Fikri dan Wahidahwati (2023) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari transfer ke daerah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Hal ini sesuai dengan penelitian Alpi dan Sirait (2022) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Jika Dana Alokasi Khusus semakin tinggi maka belanja modal akan ikut meningkat. Hal ini dapat disebabkan besarnya Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh daerah belum tentu akan meningkatkan alokasi belanja modal daerah tersebut.

Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari transfer ke daerah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mahardika dan Riharjo (2019) menunjukkan hasil pengujian bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan dana alokasi umum maka akan terjadi peningkatan biaya belanja modal. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Pratama, 2018). Sehingga menyebabkan perekonomian suatu negara dapat berkembang dan berubah dari masa ke masa Pertumbuhan ini juga melibatkan peningkatan terhadap pendapatan masyarakat.

Tujuan penelitian adalah (1) Untuk menguji Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal, (2) Untuk menguji Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal, (3) Untuk menguji Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, (4) Untuk menguji Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel *moderating*, (5) Untuk menguji Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel *moderating*, (6) Untuk menguji Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel *moderating*.

## TINJAUAN TEORITIS

### Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan hubungan antara *principal* dan *agent*. Dalam konteks pemerintahan demokratis, hubungan antara pemerintah dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan. Dalam teori keagenan, pemerintah memiliki tugas untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hubungan agensi ini, DPRD berperan sebagai *agen*, sedangkan masyarakat menjadi *prinsipal*. Namun, DPRD juga berperan sebagai prinsipal sementara Pemerintah Daerah sebagai agen. Oleh karena itu, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, sementara Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas

penganggaran. *Principal* berperan sebagai pemberi perintah, bertanggung jawab atas pengawasan, penilaian, dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh *agent*. *Agent*, sebagai penerima perintah yang menjalankan tugas sesuai dengan instruksi *principal*.

### **Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk menjalankan dan menangani sendiri kegiatan pemerintahan dan kebutuhan masing-masing masyarakat setempat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat (Rahim, 2023). Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat. Dilihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga (*huishouding*) otonomi daerah yang diadopsi (Fauzi, 2019).

### **Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa struktur APBD memiliki struktur satu kesatuan yang terdiri dari (1) Belanja Daerah, (2) Pendapatan Daerah, (3) Pembiayaan Daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Digunakan untuk tujuan memberikan kebebasan kepada daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pendapatan asli daerah sangat penting karena merupakan sumber pendapatan utama yang mendukung aktivitas daerah.

### **Dana Alokasi Khusus**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari transfer ke daerah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, kebijakan dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu daerah di bawah rata-rata nasional dengan memberikan dana untuk kegiatan yang melibatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang diperlukan untuk pelayanan publik dasar, memfasilitasi pembangunan infrastruktur.

**Dana Alokasi Umum**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. Dengan adanya dana alokasi umum maka dapat mengurangi ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya. Adanya otonomi daerah mengakibatkan ketimpangan fiskal yang tidak bisa dihindari. Daerah yang tingkat kemiskinan tinggi dan pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum lebih besar dari daerah yang kaya dan pendapatan asli daerahnya lebih tinggi begitupun sebaliknya (Anggareni dan Sapari, 2023).

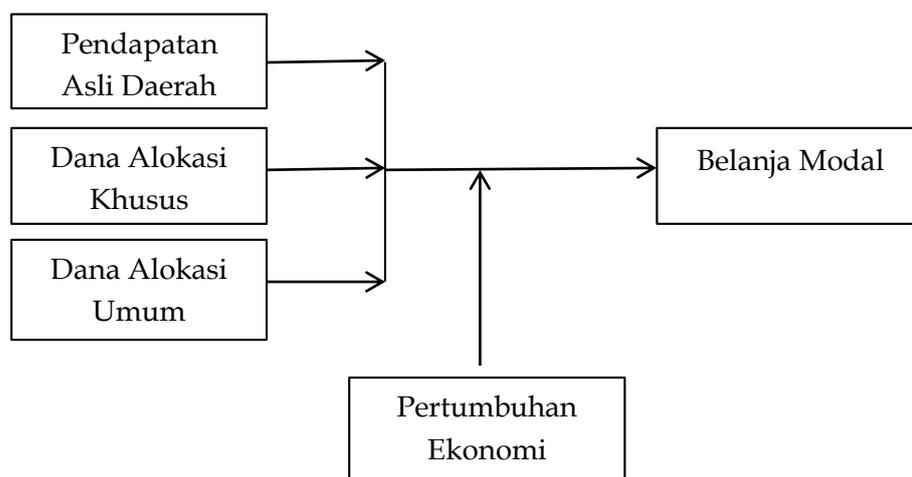
**Belanja Modal**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK 02/2011 tentang klasifikasi anggaran, belanja modal dikelompokkan menjadi enam kategori yaitu (1) Belanja modal tanah, (2) Belanja modal peralatan dan mesin, (3) Belanja modal gedung dan bangunan, (4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, (5) Belanja modal lainnya, (6) Belanja modal Badan Layanan Umum.

**Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Pratama (2018) Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita. Sehingga menyebabkan perekonomian suatu negara dapat berkembang dan berubah dari masa ke masa. Pertumbuhan ini juga melibatkan peningkatan terhadap pendapatan masyarakat. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan daerah.

**Rerangka Pemikiran**



Gambar 1  
Rerangka Pemikiran

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya untuk meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah akan melakukan pengeluaran modal. Sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan berdampak pada peningkatan Belanja Modal. Sehingga dapat disimpulkan semakin meningkat pendapatan asli daerah maka belanja modal juga akan meningkat. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Pradana (2017), Astuti (2019), Diputra dan Idayati (2023), serta Rahmitasari dan Asyik (2023) membuktikan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh positif terhadap belanja modal, Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

#### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan khusus dan menjadi prioritas negara dalam melaksanakan urusan daerah. Diharapkan bahwa pemerintah daerah akan mengalokasikan sumber daya dari Dana Alokasi Khusus ini secara efisien dan efektif, terutama dalam pengembangan infrastruktur transportasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi alokasi Dana Alokasi Khusus, maka belanja modal juga akan meningkat. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Pradana (2017), Dewi (2019), Wawo dan Sulistyowati (2022) bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil dan analisis ketiga penelitian diatas maka peneliti menyimpulkan hipotesis:

H<sub>2</sub>: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

#### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk memastikan kesetaraan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup kesenjangan yang muncul karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang tersedia. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahardika dan Riharjo (2019), Astuti (2019) dan Wisnuwardana dan Kurnia (2023) memberikan hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Berdasarkan dari penelitian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

#### **Pertumbuhan Ekonomi mampu Memoderasi Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan, hal ini akan berdampak pada peningkatan

sumber pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahardika dan Riharjo serta Rahmitasari dan Asyik (2023) memberikan hasil bahwa, Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pendapatan asli daerah terhadap belanja modal. Berdasarkan dari penelitian terdahulu tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

### **Pertumbuhan Ekonomi mampu Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan khusus dan menjadi prioritas negara dalam melaksanakan urusan daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dapat meningkatkan hubungan antara sumber dana dan belanja modal dengan diarahkannya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Hal ini disebabkan bahwa sumber dana yang dialokasikan untuk belanja pembangunan daerah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah, sehingga diharapkan bahwa sumber dana tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembangunan daerah. Pada penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Cahyaning (2023) memberikan hasil bahwa Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Berdasarkan dari penelitian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H<sub>5</sub>: Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal

### **Pertumbuhan Ekonomi mampu Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi sebuah daerah, semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diarahkan untuk belanja modal. Pada akhirnya, peningkatan pendapatan perkapita penduduk akan menyebabkan peningkatan tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk. Dana Alokasi Umum merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, lalu didistribusikan ke setiap daerah dengan tujuan mempromosikan keseimbangan keuangan di antara daerah untuk membiayai pengeluaran dan belanja pemerintah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahardika dan Riharjo (2019) dan Fikri dan Wahidahwati (2023) memberikan hasil bahwa Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi dana alokasi umum terhadap belanja modal. Berdasarkan dari penelitian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>6</sub>: Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019). Populasi yang digunakan dan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur pada tahun 2019 hingga 2022 dengan jumlah 38 Kabupaten/Kota.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* merupakan teknik pemilihan sampel yang berdasarkan dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu (1) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, (2) Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang tidak menyajikan data laporan hasil pemeriksaan LKPD secara lengkap dan ada keterbatasan publikasi tahun anggaran 2019-2022, (3) Rekapitulasi Data Produk Domestik Regional Bruto dari *e-book* BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang tidak lengkap. Berdasarkan kriteria tersebut maka penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 37 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara dapat melalui orang atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD periode tahun 2019-2022 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Serta data Pertumbuhan Ekonomi yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto yang telah dinyatakan dalam persen per tahun diperoleh dari publikasi *online* dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yang dapat diunduh melalui website dan <https://jatim.bps.go.id>.

### **Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Bebas (*Independent Variable*)**

##### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Digunakan untuk tujuan memberikan kebebasan kepada daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 perhitungan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

$PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah$

##### **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik. Dalam bentuk formula, kriteria umum Perhitungan Dana Alokasi Khusus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2013 tentang Dana Perimbangan yang menyebutkan bahwa perhitungan Dana Alokasi Khusus, sebagai berikut:

$DKU = (PAD + DAU + (DBH - DBHDR)) - Belanja Gaji PNSD$

##### **Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU bersifat *Block Grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah

sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016) untuk menghitung dana alokasi umum dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum = Celah Fiskal + Alokasi Dasar

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal

Alokasi Dasar =  $90\% \times 25\% \times \text{PDN} \times \text{Bobot Kabupaten/Kota}$

### **Variabel Terikat (*Dependent Variable*)**

#### **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aset-aset tersebut harus sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah tersebut. Dalam perspektif penganggaran partisipatif, masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam proses penganggaran belanja modal. Keterlibatan masyarakat dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal. Untuk menghitung Belanja Modal dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan Dan Mesin + Belanja Gedung Dan Bangunan + Belanja Irigasi Dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya.

### **Variabel Moderasi (*Moderating Variable*)**

#### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan/kemajuan pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan pertumbuhan capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan harga konstan antara periode sekarang dan tahun-tahun sebelumnya di suatu daerah. Angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai PDRB pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}$$

Keterangan:

$PDRB_t$  = Pendapatan Domestik Regional Bruto Periode berjalan

$PDRB_{t-1}$  = Pendapatan Domestik Regional Bruto periode tahun sebelumnya

### **Teknik Analisis Data**

#### **Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang menggambarkan data penelitian melalui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dalam penelitian. Digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran tentang objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang tepat.

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan terikat memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan

menggunakan dua cara yaitu uji *Kolmogorov-Sminov* dan menggunakan uji *Normal Probability Plot* (Ghozali, 2018). Uji *Normal probability plot* dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normal. Uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilihat dari nilai signifikansi > 5% atau 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Apabila nilai signifikansi <5% atau 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas yang bertujuan untuk melakukan pengujian apakah model regresi yang ditemukan terdapat korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi diantara variabel. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* dengan ketentuan apabila nilai VIF >10 dan nilai *Tolerance* <0,1 maka data terindikasi multikolinearitas dan jika nilai VIF <10 dan nilai *Tolerance* >0,1 maka data terbebas dari indikasi multikolinearitas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang bertujuan mengetahui korelasi yang terjadi antar error/residual pada periode tertentu (misal t) dengan error/residual pada periode lainnya. Asumsi autokorelasi hanya diujikan pada data yang bersifat *time series* yang memiliki pola urutan yang baku antar pengamatan. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel *durbin watson* pada signifikansi 5% dengan rumus ( $k'; N$ ).. Apabila nilai d (*durbin watson*) lebih kecil dari  $d_L$  atau lebih besar dari  $(4-d_L)$  maka hipotesis nol ditolak, yang berarti ada autokorelasi. Jika terletak antara  $d_U$  dan  $(4-d_U)$ , maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.

### Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam menguji heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan hasil uji berdasarkan *scatterplot*. Analisis pada grafik *scatterplot* dapat diketahui dari penyebaran data diantaranya, (1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar lalu menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, (2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2018) analisis regresi linier berganda adalah metode statistik yang diperlukan guna menguji hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Menurut Ghozali (2006) *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau Uji interaksi adalah aplikasi khusus regresi berganda linier, dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur (perkalian dua atau lebih dari variabel independen). Berikut merupakan bentuk model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$BM = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DAK + \beta_3 DAU + \beta_4 PE + \beta_5 PAD * PE + \beta_6 DAK * PE + \beta_7 DAU * PE + e$$

Keterangan:

BM : Belanja Modal

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1-\beta_7$	: Koefisiensi Regresi
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
PE	: Pertumbuhan Ekonomi
e	: Standar Error

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2018) Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam memberikikan keterangan mengenai variasi variabel terikat. Nilai pada koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Jika nilai koefisien determinasi rendah (sekitar 0) maka kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, ketika nilai koefisien determinasi tinggi (sekitar 1), maka variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### Uji Kelayakan Model (Uji f)

Menurut Ghozali (2018) Uji F bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Menyatakan bahwa uji F dilakukan dengan menggunakan signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Berikut adalah kriteria dari pengujian uji f ini (1) Jika nilai signifikan uji F  $> 0,05$  berarti model tersebut tidak layak digunakan dalam penelitian, (2) Jika nilai signifikan uji F  $< 0,05$  berarti. berarti model tersebut layak digunakan dalam penelitian.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Menurut Ghozali (2018) Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi untuk nilai t sebesar 5% atau 0,05. Adapun kriteria pengujian t yaitu (1) Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak yang mempunyai arti bahwa variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, (2) Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka hipotesis diterima yang mempunyai arti bahwa variabel independen tersebut mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yaitu 38 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota yaitu total jumlah dari Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel penelitian yang digunakan berjumlah 148 sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Data yang digunakan adalah laporan realisasi APBD pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang didapatkan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Jumlah keseluruhan sampel yang digunakan adalah 148 sampel.

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
D	PA 48	25.63	29.31	26.6330	.56100
K	DA 48	24.80	27.36	26.2971	.55785
U	DA 48	26.63	28.18	27.5447	.29591
	PE 48	.12	8.88	4.1032	1.68432
	BM 48	24.96	28.64	26.5074	.48355
d N	Vali 48 (list wise)				

Sumber : Data Sekunder diolah, *output SPSS 27 (2024)*

### Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari tabel 2 menyajikan informasi bahwa Pendapatan Asli Daerah yang memiliki nilai minimum sebesar 25.63 yang diperoleh Kabupaten Sampang pada tahun 2021, Pendapatan Asli Daerah yang memiliki nilai maksimum sebesar 29.31 yang diperoleh Kota Surabaya Tahun 2019 Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 adalah sebesar 26.6330 dan nilai standar deviasi sebesar .56100.

### Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan hasil data yang diperoleh menyajikan informasi bahwa Dana Alokasi Khusus yang memiliki nilai minimum sebesar 24.80 yang diperoleh Kota Batu Tahun 2020. Dana Alokasi Khusus yang memiliki nilai maksimum sebesar 27.36 yang diperoleh kota Surabaya Tahun 2022 Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 adalah sebesar 26.2971 dan nilai standar deviasi sebesar .55785

### Dana Alokasi Umum

Berdasarkan hasil data yang diperoleh menyajikan informasi bahwa Dana Alokasi Umum yang memiliki nilai minimum sebesar 26.63 yang diperoleh Kota Mojokerto Tahun 2022. Dana Alokasi Umum yang memiliki nilai maksimum sebesar 28.18 yang diperoleh Kabupaten Malang Tahun 2019. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 adalah sebesar 27.5447 dan nilai standar deviasi sebesar .29591.

### Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil data Pertumbuhan Ekonomi yang diperoleh menyajikan informasi bahwa Pertumbuhan Ekonomi yang memiliki nilai minimum sebesar -0.12 yang diperoleh Kabupaten Madiun Tahun 2020 Pertumbuhan Ekonomi yang memiliki nilai maksimum sebesar 8.88 yang diperoleh Kabupaten Tuban Tahun 2022. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 adalah sebesar 4.1032 dan nilai standar deviasi sebesar 1.68432.

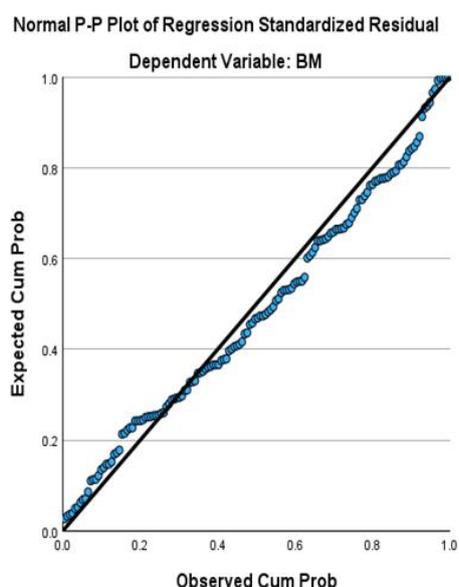
### Belanja Modal

Berdasarkan hasil data Belanja Modal yang diperoleh menyajikan informasi bahwa Belanja Modal yang memiliki nilai minimum sebesar 24.96 yang diperoleh Kota Probolinggo Tahun 2021. Belanja Modal yang memiliki nilai maksimum sebesar 28.64 yang diperoleh Kota Surabaya Tahun 2019. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) yang dihasilkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022 adalah sebesar 26.5074 dan nilai standar deviasi sebesar .48355.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Hasil uji hipotesis dengan grafik *Normal Probability Plot* dengan menggunakan pengolahan data SPSS 27 sebagai berikut:



Gambar 2  
Grafik Normal Probability Plot  
Sumber : Data Sekunder diolah, *output* SPSS 27 (2024)

Berdasarkan gambar 2 diatas yang menggunakan grafik *Normal Probability Plot* terlihat bahwa ada penyebaran data (titik-titik) pada grafik yang berada pada sekitar garis dengan arah yang mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa data residual telah memenuhi ketentuan untuk distribusi normal.

Tabel 3  
Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		148
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	.0000000
	Std.Deviation	.353668333
Most Extreme Differences	Absolute	.071
	Positive	.071
	Negative	-.061
Test Statistic		.071
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		.0.200 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data

c. Lilliefors Significance Correction

Sumber : Data Sekunder diolah, *Output* SPSS (2024)

Berdasarkan data pada tabel 3 diatas yang menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 yang artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil tersebut telah memenuhi ketentuan residual yang berarti data terdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas yang bertujuan untuk melakukan pengujian apakah model regresi yang ditemukan terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi diantara variabel. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance*. Apabila terdapat nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,10, dinyatakan tidak ada multikolinearitas antara variabel independen didalam model regresi. Berikut ini merupakan hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan pengolahan data SPSS 27 sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolineritas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	M	Collinearity Statistic	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	104	9.641
	DAK	101	9.920
	DAU	148	6.756
	PE	.041	4.594
	PAD*PE	.065	6.754
		.075	7.096
	DAK*PE		
		121	9.677
	DAU*PE		

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data Sekunder diolah, Output SPSS 27 (2024)

Berdasarkan data pada tabel 4 diatas yang menunjukkan hasil uji multikolinearitas dapat diketahui masing-masing variabel yang ditunjukkan oleh nilai VIF yang lebih kecil dari 0,10 ( $VIF < 10$ ) dan nilai *Tolerance* yang lebih besar  $> 0,10$ . Sehingga hasil yang diperoleh dalam uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang bertujuan mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya. Jika nilai d terletak antara  $d_U$  dan  $(4-d_U)$ , maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Berikut ini merupakan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan pengolahan data SPSS 27 sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.685	.469	.447	.35972	1.032

a. Predictors: (Constant), DAUPE, DAU, PAD, DAK, PE, PADPE, DAKPE

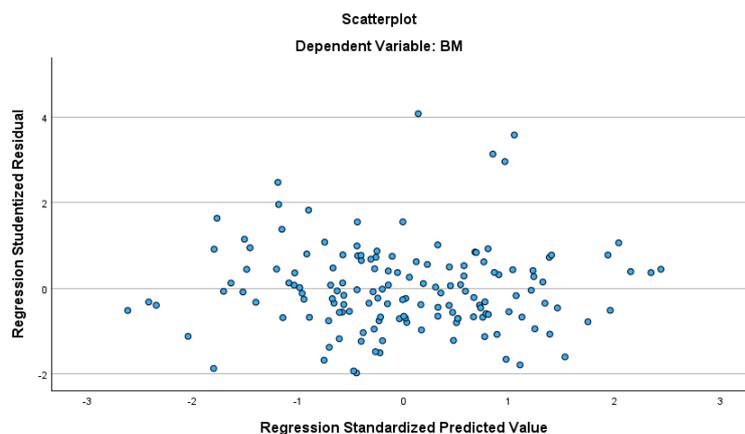
b. Dependent Variable: BM

Sumber : Data Sekunder diolah, *Output SPSS 27 (2024)*

Berdasarkan data pada tabel 5 diatas yang menunjukkan hasil uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson* dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.032 yang terletak antara  $d_U$  dan  $(4-d_U)$  yang berarti tidak ada autokorelasi. Sehingga hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tidak ada atau bebas dari gejala autokorelasi dalam model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut telah terpenuhi.

**Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah ada varian variabel dalam model regresi yang tidak sama atau konstan. Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homokedastisitas. Jika titik-titik pada grafik *scatter plot* menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas. Berikut ini merupakan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan pengolahan data SPSS 27 sebagai berikut:



**Gambar 3**  
**Grafik Scatter Plot**

Sumber : Data Sekunder diolah, *output SPSS 27 (2024)*

Berdasarkan pada grafik gambar 3 diatas yang menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatter plot* dapat diketahui yang menunjukkan bahwa penyebaran data (titik-titik) menyebar secara acak dan terpencar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi atau bebas dari heteroskedastisitas dalam model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut telah memenuhi asumsi dan layak digunakan dalam penelitian.

### Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dapat digunakan untuk menguji besarnya hubungan antara variabel independent yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan variabel dependen yaitu belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating dalam satu model prediksi. Hasil linier berganda dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	8.421	3.156			2.688	.009
	PAD	.968	.012	.6219		5.429	.000
	DAK	-.009	.075	-.010		-.116	.907
	DAU	-.002	.051	-.170		-.045	.964
	PE	-.044	.014	-.033		-.221	.491
	PAD*PE	.840	.002	.418		4.306	.000
	DAK*PE	-.021	.015	-.030		-.634	.527
	DAU*PE	-.005	.022	-.006		-.063	.950

1. Dependent Variable: BM

Sumber : Data Sekunder diolah, Output SPSS 27 (2024)

$$BM = 8.421 + 0,968 \text{ PAD} - 0,009 \text{ DAK} - 0,002 \text{ DAU} - 0,718 \text{ PE} + 0,840 \text{ PAD*PE} - 0,021 \text{ DAK*PE} - 0,044 \text{ DAU*PE} + e$$

Nilai konstanta yaitu sebesar 8.421. Nilai koefisien regresi Pendapatan asli daerah yaitu sebesar 0,968 menunjukkan hubungan yang searah antara Pendapatan asli daerah dengan Belanja Modal. Nilai Koefisien Regresi Dana Alokasi Khusus yaitu sebesar -0,009, nilai tersebut menunjukkan hubungan yang tidak searah antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal. Nilai Koefisien Regresi yaitu sebesar -0,002. Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang tidak searah antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal. Koefisien Regresi yaitu sebesar -0,044 hubungan yang tidak searah antara pertumbuhan ekonomi dengan Belanja Modal. Nilai Koefisien Regresi yaitu sebesar -0,021. Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang tidak searah antara Dana Alokasi Khusus dengan pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal. Nilai Koefisien Regresi yaitu sebesar -0,005. Nilai tersebut menunjukkan hubungan yang tidak searah antara dengan Dana Alokasi Umum dengan pertumbuhan ekonomi terhadap Belanja Modal.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji Koefisien Determinasi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam memberikan keterangan mengenai variasi variabel terikat. Koefisien ini akan menunjukkan seberapa besar prosentase variabel independen yang digunakan dalam model mampu menerangkan variasi variabel dependen Berikut ini

merupakan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dengan menggunakan pengolahan data SPSS 27 sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 <sup>a</sup>	.469	.447	.35972

a. Predictors: (Constant), DAU\*PE, PE, DAK, PAD, DAU, DAK\*PE, PAD\*PE

Sumber : Data Sekunder diolah, Output SPSS 27 (2024)

Berdasarkan data pada tabel 7 diatas yang menunjukkan hasil uji koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,469 hal ini yang artinya bahwa terdapat pengaruh sebesar 46,9 % yang berasal dari variabel bebas yakni PAD, DAK, DAU, PAD\*-PE, DAK\*PE, DAU\*PE dan variabel dependen yakni BM, Sedangkan sisanya Sehingga 53,1 % dipengaruhi oleh faktor-faktor variabel lainnya yang tidak diteliti atau faktor lain diluar model penelitian.

**Uji Kelayakan Model (Uji f)**

Uji f yang digunakan untuk menguji apakah variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Aloksi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki secara berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal tersebut layak digunakan atau tidak dalam suatu penelitian. Berikut ini merupakan hasil uji f dengan menggunakan pengolahan data SPSS 27 sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji f**  
**Anova<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	16.12	7	2.6	20.772	.000 <sup>b</sup>
	Residual	18.24	14	.12		
	Total	34.37	21			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DAU\*PE, DAU, PAD, DAK, PE, PAD\*PE, DAK\*PE,

Sumber : Data Sekunder diolah, Output SPSS 27 (2024)

Berdasarkan data pada tabel 8 diatas yang menunjukkan hasil uji f pada F hitung yaitu sebesar 20.772 dengan nilai signifikan yaitu sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Hal ini menunjukkan data yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat dan dapat memberikan hasil yang layak. Hal ini dikarenakan data tersebut telah menunjukkan adanya pengaruh secara bersama-sama antara hubungan variabel independen, dependen dan variabel moderating.

**Uji Hipotesis (Uji t)**

Uji t yang digunakan dengan tujuan untuk menguji koefisien regresi secara parsial apakah variabel independen yakni PAD, DAK, DAU, PAD\*PE, DAK\*PE dan DAU\*PE memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yakni BM, sehingga dilakukan pengujian t. Jika nilai signifikan kurang dari (uji t < 0,05) artinya bahwa H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, maka secara parsial variabel independen memberikan pengaruh terhadap variabel dependen.

Berikut ini merupakan hasil uji t dengan menggunakan pengolahan data SPSS 27 sebagai berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

odel	M	Unstandardi		
		zed Coefficients		
		Beta	t	Sig.
1	(Constant)	8.421	3.156	.000
	PAD	.968	5.429	.000
	DAK	-.009	-.116	.907
	DAU	-.002	-.045	.964
	PE	-.044	-.221	.491
	PAD*PE	.840	4.306	.000
	DAK*PE	-.021	-.634	.527
	DAU*PE	-.005	-.063	.950

1. Dependent Variable: BM

Sumber : Data Sekunder diolah, Output SPSS 27 (2024)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa PAD terhadap BM memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga  $H_1$  diterima, karena Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa DAK terhadap BM memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,907 > 0,05$  sehingga  $H_2$  ditolak, karena Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa DAU terhadap BM memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,964 > 0,05$  sehingga dapat disimpulkan  $H_3$  ditolak, karena Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa PAD terhadap BM dengan PE sebagai variabel *moderating* memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai beta adalah 0,840. Hasil ini menunjukkan bahwa PE sebagai variabel *moderating* mampu memperkuat hubungan pengaruh PAD terhadap BM. Sehingga  $H_4$  diterima, karena Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa DAK terhadap BM dengan PE sebagai variabel *moderating* memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,527 > 0,05$  dan nilai beta adalah -0,021. Hasil ini menunjukkan bahwa PE sebagai variabel *moderating* memperlemah hubungan pengaruh DAK terhadap BM. Sehingga dapat disimpulkan  $H_5$  ditolak, karena Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa DAU terhadap BM dengan PE sebagai variabel *moderating* memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,950 > 0,05$  dan nilai beta adalah -0,005 Hasil ini menunjukkan bahwa PE sebagai variabel *moderating* memperlemah hubungan pengaruh DAU terhadap BM. Sehingga dapat disimpulkan  $H_6$  ditolak, karena Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

## Pembahasan

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel uji t, menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini yang dibuktikan dengan hasil uji t yang nilai signifikan sebesar ( $0,000 < 0,05$ ) dan koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar 0,968 yang memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Dari hasil ini dapat diartikan bahwa jika terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan di ikuti dengan peningkatan Belanja Modal.

Hasil pada penelitian ini sesuai dan mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ismiyati (2018), Dewi dan Asyik (2019), serta Astuti dan Mildawati (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Karena peningkatan produktivitas masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur dan sarana yang memadai. Hal ini juga mampu menarik minat investor untuk menanam modal di daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Sebagai upaya untuk meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah akan melakukan pengeluaran modal. Sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan akan berdampak pada peningkatan Belanja Modal. Sehingga dapat disimpulkan jika ada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan mendorong peningkatan pengalokasian pada belanja modal. Sehingga semakin besar kemampuan daerah untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula anggaran yang dapat dialokasikan untuk belanja modal. Sehingga terdapat hubungan yang searah antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil pengujian tabel uji t, menunjukkan bahwa telah diperoleh Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini yang dibuktikan dengan hasil uji t yang nilai signifikan sebesar  $(0,907 > 0,05)$  dan koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar  $-0,009$  yang memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Hasil pada penelitian ini sesuai dan mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astuti dan Mildawati (2019), Lailatul (2022), dan Rahmitasari dan Asyik (2023) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal memperoleh hasil yang sama yaitu pengaruh yang tidak signifikan. Dikarenakan Dana Alokasi Khusus dalam mempengaruhi alokasi Belanja Modal ini menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat untuk pengadaan aset tetap dengan masa manfaat lebih dari dua belas bulan digunakan untuk pengadaan. Sehingga meskipun dana alokasi yang diterima pemerintah daerah cukup besar, namun tata kelolanya yang tidak efektif untuk pembangunan daerah. Akibatnya, besaran Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. Seharusnya, Dana Alokasi Khusus digunakan untuk membiayai belanja modal, seperti pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, dan fasilitas umum. Hal ini karena belanja modal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, kurangnya perencanaan yang baik juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perilaku yang memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongannya sendiri.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil pengujian tabel uji t, menunjukkan bahwa telah diperoleh Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini yang dibuktikan dengan hasil uji t yang nilai signifikan sebesar  $(0,964 > 0,05)$  dan koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar  $-0,002$  yang memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dana Alokasi Umum yang kecil akan cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Hal ini terjadi karena Dana Alokasi Umum digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya, maka tidak akan meningkatkan Belanja Modal. Dana Alokasi Umum yang diberikan kepada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah tersebut. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah akan mendapat Dana Alokasi Umum yang lebih besar, sedangkan daerah dengan kapasitas fiskal tinggi akan mendapat Dana Alokasi Umum yang lebih kecil. Sehingga pengalokasian dana alokasi umum terhadap Belanja Modal yang diberikan dari pemerintah pusat tidak semuanya digunakan untuk membiayai belanja modal, namun

banyak dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang atau jasa, belanja tak terduga serta belanja lainnya.

Hasil pada penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmitasari dan Asyik (2023) serta Fikri dan Wahidahwati (2023) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal memperoleh hasil yang sama yaitu tidak berpengaruh. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian yang menemukan adanya hubungan yang tidak searah antara Dana Alokasi Umum dan belanja modal. Dikarenakan Dana Alokasi Umum akan tetap menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal. Namun masih banyak sumber pendanaan anggaran belanja modal selain dari Dana Alokasi Umum

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating**

Berdasarkan hasil pengujian tabel uji  $t$ , menunjukkan bahwa telah diperoleh Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini yang dibuktikan dari hasil uji  $t$  yang nilai signifikan sebesar ( $0,000 < 0,05$ ) dan koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar 0,840 yang memperoleh hasil bahwa tingkat Pertumbuhan Ekonomi dinyatakan mampu memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat yaitu dengan didukung oleh sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai. Didukung oleh sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai dapat membantu meningkatkan produktivitas masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ketersediaan barang dan jasa maka kualitas hidup masyarakat dapat meningkat. Apabila meningkatnya pendapatan masyarakat dapat mendorong peningkatan produktivitas dan konsumsi masyarakat.

Hasil pada penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ismiyati (2018), Megasari (2022) serta Rahmitasari dan Asyik (2023) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Apabila pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating**

Berdasarkan hasil pengujian tabel uji, menunjukkan bahwa telah diperoleh Pertumbuhan Ekonomi memperlemah pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Hal ini yang dibuktikan dari hasil uji  $t$  yang nilai signifikan sebesar ( $0,527 > 0,05$ ) dan koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar -0,021 yang memperoleh hasil bahwa tingkat Pertumbuhan Ekonomi dinyatakan tidak mampu memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Ketika suatu daerah telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah akan mengurangi pengalokasian belanja modalnya dan menggunakan Dana Alokasi Khusus tersebut untuk kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional lainnya selain belanja modal. Hal ini disebabkan oleh pengalokasian Dana Alokasi Khusus disebabkan yang oleh kurang tepat sasaran dan perencanaan yang belum baik pada program pemerintah. Ketika ekonomi daerah berkembang, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi anggaran untuk belanja modal (pembangunan infrastruktur) dan mengalihkan Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan lain yang sesuai dengan prioritas nasional, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Hasil pada penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahardika dan Riharjo (2019), Megasari (2022), serta Dيامan dan Handayani (2023) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan

antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal pemerintah kabupaten atau kota di provinsi Jawa Timur. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi tidak menjadi pertimbangan pemerintah daerah ketika memanfaatkan Dana Alokasi Khusus dalam Belanja Modal. Pemerintah daerah akan mengalokasikan Belanja Modal yang lebih besar jika menerima Dana Alokasi Khusus yang lebih besar, terlepas dari tingkat Pertumbuhan Ekonomi. Pemerintah daerah memiliki prioritas dan kebutuhan masing-masing dalam mengalokasikan Belanja Modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel *moderating***

Berdasarkan hasil pengujian tabel uji t, menunjukkan bahwa telah diperoleh Pertumbuhan Ekonomi memperlemah pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hal ini yang dibuktikan dari hasil uji t yang nilai signifikan sebesar ( $0,527 > 0,05$ ) dan koefisien regresi ( $\beta$ ) sebesar  $-0,021$  yang memperoleh hasil bahwa tingkat Pertumbuhan Ekonomi dinyatakan tidak mampu memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Banyak daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah yang rendah, sehingga tidak mampu membiayai sendiri kegiatan pembangunannya. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah bergantung pada Dana Alokasi Umum untuk membiayai berbagai program dan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi Dana Alokasi Umum tidak sepenuhnya berhasil. Hal ini menyebabkan kemandirian daerah tidak menjadi lebih baik. Ketergantungan pada Dana Alokasi Umum dapat membuat daerah menjadi kurang inovatif dalam mencari sumber pendanaan lain. Hal ini menyebabkan daerah terjebak dalam siklus ketergantungan pada Dana Alokasi Umum

Hasil pada penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pratama (2019), Mahardika dan Riharjo (2019) serta Rahmitasari dan Asyik (2023). Namun, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi hubungan antara Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal. Sehingga pemerintah daerah akan tetap mengalokasikan Belanja Modal yang lebih besar jika menerima Dana Alokasi Umum yang lebih besar, terlepas dari tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Karena semakin besar kemampuan daerah untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula anggaran yang dapat dialokasikan untuk belanja modal. (2) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. cenderung sedikit karena berubah setiap tahun dan cenderung meningkatkan aset tetap pemerintah daerah sehingga mengalami banyak perubahan yang tidak menentu atau tidak stabil. (3) Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, karena Daerah dengan kapasitas fiskal rendah akan mendapat Dana Alokasi Umum yang lebih besar, sedangkan daerah dengan kapasitas fiskal tinggi akan mendapat Dana Alokasi Umum yang lebih kecil. (4) Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan bahwa dengan peningkatan dan optimalnya pertumbuhan ekonomi, masyarakat dapat memperoleh banyak pendapatan dengan membayar pajak dan retribusi. Ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah. peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan dapat membantu meningkatkan produktivitas masyarakat (5) Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. disebabkan oleh kurang tepat

sasaran dan perencanaan yang belum baik pada program pemerintah. (6) Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah bergantung pada Dana Alokasi Umum. ini menyebabkan kemandirian daerah menjadi kurang inovatif dalam mencari sumber pendanaan lain.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah beberapa saran yang mungkin dapat diterapkan: (1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti dengan memperluas cakupan objek penelitiannya dan menambahkan variabel lainnya yang belum pernah diteliti sebelumnya. (2) Pemerintah daerah diharapkan perlu meningkatkan kualitas pendapatan asli daerah secara optimal agar kemandirian pemerintah daerah semakin tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (3) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lama. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat digeneralisasi ke periode yang lebih luas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggareni, R., dan Sapari. 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12 (7): 1-19
- Alvaro, R., dan Prasetyo., A. 2020. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi pada provinsi di Indonesia. *Jurnal Budget*, 5( 2) : 1-18
- Alpi, F., dan Sirait F. 2022. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kab/Kota di Provinsi Sumatra Utara. *Jurnal Pajak dan Akuntansi*, 23(01):1-13
- Badan Pusat Statistik. 2023. Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Menurut Jenis Belanja di Provinsi Jawa Timur (Rupiah) 2020-2022. <https://jatim.bps.go.id/>. 29 Oktober 2023 (18.40).
- .2023. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Menurut Jenis Pendapatan di Provinsi Jawa Timur (Rupiah) 2020-2022. <https://jatim.bps.go.id/>. 23 Oktober 2023 (11.21).
- Cahyaning, S., 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. (*JJET*) *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1 (3)
- Dewi. M. I dan N.F. Asyik. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8 (9): 1-16
- Diaman. T. H dan Handayani. N . 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(11) : 1-19
- Diputra. D. H dan Idayati.F. 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12 (4) :1-19
- Fikri. R. A dan Wahidawati. 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12( 5) : 1-18
- Fernandes. J. dan Fauzia. L. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada 19 Kabupaten/Kota di Sumatra Barat 2017-2020. *Jurnal Revenue dan Jurnal Akuntansi*, 3(1) : 187-197.

- Fadhila. A. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Ghozali. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IMB SPSS 25*, Edisi Kesembilan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harun.M. G. 2021. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Ismiyati. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekomomi Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Kota dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016). *e-Jurnal Akuntansi*. Universitas Nusantara PGRI Kediri. 1-16
- Karyadi. S.A. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Prpvinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Khulwani. I, Rinofah. R dan Sari. P.P. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2016-2020. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4) : 1050-1068.
- Lailatul. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Mahardika, S. A dan I. B.Riharjo. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(11): 1-16.
- Megasari, S. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal yang Dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Pradana. Y.E dan Handayani. N. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(3):1-24
- Pratama. R.I. 2019. Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal dengan PDRB sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2018. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang *Belanja Modal*. No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 06 Maret 2019. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322. Jakarta.
- Rahmitasari, A. N dan N.F.Asyik .2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12 (8):1-23
- Raharjo dan Harnovinsah. 2021. Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada kabupaten/kota provinsi Banten). *JEMASI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 17 (1)
- Soesilo, A. F. dan N. F. Asyik. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Bantuan Provinsi, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4): 1-21.

- Sunday.M. H. 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Serta Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung.
- . 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. Bandung.
- Saifuallah. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kota/Kabupaten di Jawa Tengah. *Journal Of Economics .volume 1 nomer 2 tahun 2021*.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- . Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah desentralisasi.
- Wisnuwardana, G., A dan Kurnia. 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(10):1-18.
- Wawo, Y., dan Sulistyowati., E. 2023. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(10):1-20.